

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya mengenai ukuran pemerintah daerah, belanja modal, dan temuan audit terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2021 – 2022, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2021 – 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset, apabila pemerintah daerah memiliki total aset yang besar dapat mendukung kelancaran operasional pemerintahan dan berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah daerah.
2. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi di Indonesia tahun 2021-2022. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi belanja modal kemungkinan belum dialokasikan dengan efektif sehingga belum berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah daerah.
3. Temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi di Indonesia tahun 2021-2022. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menanggapi temuan audit dengan melakukan perbaikan secara cepat dan tepat, sehingga temuan tersebut tidak mengganggu jalannya operasional pemerintahan maupun target kinerja pemerintah daerah.

#### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya penelitian ini memiliki keterbatasan pada hal-hal berikut antara lain:

1. Variabel-variabel independen yang digunakan pada penelitian ini hanya dapat menjelaskan variabel dependen yaitu kinerja pemerintah daerah sebesar 7,75%, sedangkan 92,25% dijelaskan oleh variabel independen di luar model penelitian yang digunakan.
2. Tahun pengambilan sampel hanya menggunakan dua tahun yaitu 2021 – 2022. Penulis berusaha meneliti evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD) untuk tahun terbaru, namun keterbatasan perolehan data hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah (EPPD) tersebut, sehingga tidak dapat menggunakan data terbaru yang lebih representatif pada penelitian ini.

### **5.3 Implikasi Penelitian**

#### **1. Implikasi Teoritis**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan Belanja Modal dan Temuan Audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Temuan ini memperkaya literatur terkait kinerja pemerintah daerah dengan memberikan bukti empiris bahwa terdapat faktor-faktor lain yang mungkin lebih dominan. Penelitian ini juga menegaskan perlunya pendekatan multidimensional dalam mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pemerintah daerah.

#### **2. Implikasi Praktik**

Meskipun variabel-variabel yang diuji dalam penelitian ini hanya satu variabel yang terbukti berpengaruh yaitu ukuran pemerintah daerah dan dua variabel lain tidak berpengaruh. Ukuran pemerintah daerah yang besar dapat membantu kinerja operasional pemerintah daerah secara maksimal. Namun, efektivitas penggunaan belanja modal serta tindak lanjut atas temuan audit tetap penting untuk memastikan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

### 3. Implikasi Kebijakan

Hasil ini menjadi masukan bahwa kinerja pemerintah daerah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keuangan internal seperti total aset, belanja modal atau temuan audit, tetapi juga mungkin melibatkan faktor non-keuangan dan perilaku pemerintah daerah. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam merancang kebijakan yang tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga pada penguatan kelembagaan dan penyesuaian kebijakan yang memperhatikan alokasi belanja modal, ukuran dan karakteristik daerah.

## 5.4 Saran

Berdasarkan hasil dan analisis yang diuraikan pada penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga perlu diperbaiki pada penelitian selanjutnya. Berikut beberapa saran dari peneliti:

1. Bagi Pemerintah Daerah
  - a. Pemerintah daerah perlu mengelola aset dengan baik. Mengingat Aset daerah merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah. Pengelolaan aset yang baik dan pemanfaatan aset yang optimal akan mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah.
  - b. Pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas alokasi pengelolaan belanja modal dengan mengutamakan program yang berdampak pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Pengawasan dan evaluasi terhadap realisasi belanja modal perlu diperkuat agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
  - a. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih variatif menggunakan variabel lain yang dapat memengaruhi kinerja pemerintah secara langsung. Seperti tingkat pertumbuhan, *leverage*

ataupun bisa menggunakan variabel yang menjadi indikator kinerja kunci (IKK) dan menjadi komponen dalam penilaian EPPD, misalnya kinerja bidang urusan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

- b. Penelitian selanjutnya disarankan untuk tidak menggunakan data *cross-sectional* apabila variabel kinerja pemerintah daerah yang diukur berdasarkan skor EPPD dijadikan variabel dependen dan temuan audit sebagai variabel independen. Hal ini skor EPPD pada tahun yang sama dengan tahun terbitnya temuan audit kurang mempresentasikan pengaruh temuan tersebut, karena pemerintah daerah biasanya langsung menindaklanjuti temuan audit pada tahun yang sama, sehingga dampaknya baru akan tercermin dalam penilaian kinerja pada tahun berikutnya.
- c. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan indikator jumlah nominal temuan audit dalam mengukur variabel temuan audit. Penggunaan nominal temuan audit dianggap lebih tepat karena mampu mencerminkan tingkat materialitas dari temuan tersebut, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat terkait dampaknya terhadap kinerja pemerintah daerah. Dibandingkan dengan jumlah temuan secara kuantitas, nilai nominal lebih mempresentasikan besarnya risiko atau potensi kerugian yang ditimbulkan akibat temuan audit.
- d. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan hasil EPPD tahun terbaru dan menggunakan nilai EPPD beberapa tahun karena penilaian EPPD ini dilakukan rutin oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahun.